

**ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN
LINGKUNGAN**

**(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2008-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ANDI RACHMANDA

NIM. 12030110120118

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Andi Rachmanda
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120118
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi Empiris
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2008-2012)**

Dosen Pembimbing : Fuad, SET. , M. Si. , Ph. D.

Semarang, 13 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

(Fuad, SET., M.Si., Ph.D.)

NIP. 19790916200812

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Andi Rachmanda
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120118
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi Empiris
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2008-2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Maret 2014

Tim Penguji:

1. Fuad, SET., M.Si., Ph.D (.....)
2. Wahyu Meiranto, SE, M.Si, Akt (.....)
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Andi Rachmanda menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat maupun pemikiran yang berasal dari penulis lain, yang seolah-olah menjadi sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau tulisan yang saya ambil dari penulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 13 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

(Andi Rachmanda)

NIM. 12030110120118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“You Won’t Know The Facts Until You’ve Seen The Fiction” – Pulp Fiction

“The Greatest Inspiration Is Deadline”

“Keberhasilan adalah keberanian menuntaskan suatu pilihan dan kegagalan adalah keputusan menyalahkan suatu pilihan”

“As my soul heals the shame I will grow through this pain. Lord I'm doing all I can to be a better man” – Robbie Williams

“Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri” - HR. Bukhari

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan saudara-saudariku, Anitya Ardiyani yang selalu memacuku untuk maju, guru dan dosen yang senantiasa memberikan ilmu, serta teman-teman seperjuanganku dalam suka dan duka semenjak SD hingga kuliah ini. Semua hal terbaik yang kupunya akan kupersembahkan kepada kalian.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance mechanisms on the policy of social and environmental disclosure. Indicators used to measure corporate governance mechanisms in this study is the proportion of independent board, the structure of the Chief Risk Officer (CRO), managerial ownership, board size, independence of the audit committee, the board of commissioners meeting frequency, as well as the nomination and remuneration committee. While social and environmental disclosure as the dependent variable was measured using a amount disclosure items appropriate with the Global Reporting Initiative (GRI) G3. 1 index. In addition, this study also added two control variables are firm size firm size and leverage.

This study uses secondary data with entire population of banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2012. The method used to determine the sample using purposive sampling. The analytical method used is multiple linear regression, regression testing prior to first tested the classical assumptions.

The results of hypothesis testing showed that the proportion of independent board negatively affects the social and environmental disclosure. Other results noted that the structure of the CRO, managerial ownership, as well as the nomination committee and remuneration positive effect on social and environmental disclosure. While the size of the board of directors, audit committee independence, and the frequency of meetings of the board of commissioners did not significantly affect disclosure. Overall it can be concluded from these results that the corporate governance mechanisms affect social information disclosure policy and corporate environments.

Keywords: *corporate governance, sustainability report, social and environmental disclosure, GRI*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, struktur *Chief Risk Officer* (CRO), kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta komite nominasi dan remunerasi. Sedangkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan sebagai variabel dependen diukur menggunakan jumlah item pengungkapan sesuai dengan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) G3. 1. Di samping itu, penelitian ini juga menambahkan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Hasil lain mencatatkan bahwa struktur CRO, kepemilikan manajerial, serta komite nominasi dan remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Sedangkan ukuran dewan direksi, independensi komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi kebijakan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan.

Kata kunci: *corporate governance*, pengungkapan sosial dan lingkungan, GRI

KATA PENGANTAR

Assalamualikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kebijakan Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan karunia, petunjuk, dan rahmat-Nya yang luar biasa sehingga penulis senantiasa semangat selalu menyelesaikan skripsi hingga akhir.
2. Prof.Drs.Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

3. Prof.Dr.H.Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Fuad, SET., M.Si. , Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.si. , Akt. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah bersedia melayani dan memberikan pengalaman dari pertama kali penulis menginjakkan kaki di kampus hingga selesai studi.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Rahardjo dan Ibu Triana Lies Juliati aserta kakak-kakakku Dian Ayu Noviarini, Dina Rizkita Sari, dan Anna Mariska yang telah memberikan perhatian dan semangatnya kepada penulis
8. Anitya Ardiyani Puspita yang telah menjadi cahaya dalam kehidupan penulis, senantiasa memotivasi, menghibur, serta berbagi rasa di saat suka dan duka.
9. Teman-teman “Rak Tau Dolan” Hisyam, Alto, Arvina, Tatang, Lina, Gentong, Evan, Rido, Nita, Silvy, Indri, dan Sapi yang selalu seru, penuh cerita, dan penuh kenangan selama masa kuliah ini.
10. Sahabat-sahabat SMAku Hamid, Wisnu, Habibi, Meng, Gazi, dan Udin yang sampai kapanpun tidak akan pernah lepas tali persaudaraannya.

11. Teman-teman akuntansi 2010 yang tidak kalah gaul dan pintarnya Raras, Watek, Sika, Arya, Ferandi, Mahendra, Yudha, Depi, Nunung, Norma, Winda, Randy, Tedo, Bowok, dan Sopi yang selalu enak diajak tongkrong dan selalu enak diajak bertukar pikiran. Kemudian teman satu bimbingan Rofiqoh dan Firda yang menjadi teman bertukar pikiran mengenai skripsi.
12. Anak-anak Harmony Blast Rachel, Rafly, Zulfikar, Bulan, Enny, Sta, dan Ruben yang selalu inspiratif dan mengajarkan penulis menjadi organisator yang baik.
13. Teman-teman KKN Bakalan Squad Fani, Ina, Memey, Umar, Gembul, Ilyas, Devi, mbak Madu, dan Dara yang menjadi teman seperjuangan selama KKN.
14. Sesama pasangan akuntansi 2010 Rezky-Grace, Toying-Nanda, dan Bangkit-Zia yang selalu kompak dan menjadi teman curhat penulis bila ada masalah.
15. Teman-teman tim CS Villa Cluster Acil, Deko, Avenus, Seno, Tommy, Dinar, Arya, Aldo, dan Bagus yang selalu berisik dan asik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, karena itu penulis menerima kritik dan saran demi tercapainya hasil yang lebih baik. Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pihak-pihak terkait.

Semarang, 23 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	19
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	21
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	21
2.1.3.2 Prinsip <i>Corporate Governance</i>	23

2.1.3.3 Peraturan <i>Corporate Governance</i>	26
2.1.4 Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	27
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.4 Perumusan Hipotesis	36
2.4.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	36
2.4.2 Pengaruh Struktur <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	37
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	38
2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	40
2.4.5 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	41
2.4.6 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	42
2.4.7 Pengaruh Komite Nominasi dan Remunerasi Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)	45
3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)	46
3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen	46
3.1.2.2 Struktur <i>Chief Risk Officer</i> (CRO)	46
3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial	47
3.1.2.4 Ukuran Dewan Direksi	47
3.1.2.5 Independensi Komite Audit	48
3.1.2.6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	48

3.1.2.7 Komite Nominasi dan Remunerasi	48
3.1.3 Variabel Kontrol	49
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	49
3.1.3.2 <i>Leverage</i>	49
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.2.1 Populasi Penelitian	50
3.2.2 Sampel Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Metode Pengumpulan Data	51
3.5 Metode Analisis Data	51
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	51
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	52
3.5.2.1 Uji Normalitas	52
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas	53
3.5.2.3 Uji Multikolinieritas	54
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	54
3.5.3 Uji Analisis Regresi Berganda	55
3.5.4 Pengujian Hipotesis	57
3.5.4.1 Uji Parsial (<i>t-Test</i>).....	57
3.5.4.2 Uji Simultan (<i>F-Test</i>).....	58
3.5.5 Uji Koefisien Determinasi.....	58
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	65
4.2.2.1 Uji Normalitas	65
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	67
4.2.2.3 Uji Multikolonieritas	72

4.2.2.4 Uji Autokorelasi	74
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	76
4.2.3.1 Uji Analisis Regresi Berganda.....	76
4.2.3.2 Uji Parsial (<i>t-Test</i>).....	79
4.2.3.3 Uji Simultan (F test)	85
4.2.3.4 Uji Koefisien Determinasi	87
4.3 Analisis Hipotesis.....	88
4.3.1 Hipotesis 1	88
4.3.2 Hipotesis 2	89
4.3.3 Hipotesis 3	90
4.3.4 Hipotesis 4	91
4.3.5 Hipotesis 5	92
4.3.6 Hipotesis 6	93
4.3.7 Hipotesis 7.....	94
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian	98
5.3 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Objek Penelitian	61
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3 Frekuensi CRO.....	63
Tabel 4.4 Frekuensi KMAN.....	64
Tabel 4.5 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	67
Tabel 4.6 Uji Glejser	69
Tabel 4.7 Uji Korelasi <i>Spearman's Rho</i>	70
Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas.....	73
Tabel 4.9 Kriteria Uji Durbin Watson	74
Tabel 4.10 Uji Durbin Watson	75
Tabel 4.11 Tabel Analisis Regresi Linier Berganda	76
Tabel 4.12 Analisis Korelasi Berganda.....	79
Tabel 4.13 Uji Parsial (<i>t-Test</i>).....	80
Tabel 4.14 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis.....	84
Tabel 4.15 Uji Simultan (F-test)	86
Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Grafik Batang Frekuensi CRO	64
Gambar 4.2 Grafik Batang Frekuensi KMAN	65
Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot	66
Gambar 4.4 Grafik Plot ZPRED dan SRESID.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Indeks GRI G3. 1	106
Lampiran B Sampel Penelitian.....	114
Lampiran C Output SPSS 20	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan kekayaan perusahaan dengan cara mengelola sumber daya serta meningkatkan kinerja perusahaan demi mencapai tujuan kepentingan pemilik perusahaan adalah salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pentingnya penilaian kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan akan membantu para manajer untuk mengevaluasi dan menyiapkan perencanaan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan di tengah sistem ekonomi kompleks yang semakin bebas dan terbuka.

Peningkatan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) seharusnya sudah tidak bersifat sementara tetapi merupakan suatu sistem untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen perusahaan telah berjalan sesuai tujuan perusahaan demi mencapai keselarasan tujuan (*goal congruence*).

Menurut Komite Cadbury (1992) *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya yang berwujud pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Untuk dapat memahaminya, maka diperlukan pemahaman terhadap tujuan dari *corporate governance* sendiri. Tujuan *corporate governance* yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (FCGI, 2006).

Pentingnya *corporate governance* telah menjadi sorotan berbagai entitas dari seluruh dunia karena dapat menjadi suatu sumber permasalahan yang mengganggu kinerja perusahaan dan bukan merupakan fenomena baru dalam dunia bisnis. Berthelot, Morris, dan Morrill (2010) berpendapat bahwa manajer harus dikontrol dan diawasi dengan seksama dalam rangka mencegah kerugian bagi perusahaan. Terungkapnya skandal keuangan berskala besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan Global Crossing telah menyebabkan kajian mengenai *corporate governance* meningkat pesat. Iskander dan Chamlou (2000) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang pernah melanda Asia Tenggara dan negara-negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya *corporate governance* di negara-negara yang terkena krisis seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan kontrol audit yang masih belum aplikatif, lemahnya pengawasan

komisaris, pasar modal yang masih *under-regulated*, serta terbaikannya hak minoritas.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* yang baik tak hanya berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga masyarakat secara luas. Akibatnya, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* sangat mementingkan penerapan dan penegakan *corporate governance* di negara-negara penerima dana karena mereka menganggap bahwa *corporate governance* merupakan bagian penting dari sistem efisiensi pasar. Menurut Sumariyati dan Poeradisastra (2005) jika perusahaan yang melaksanakan prinsip atau pedoman *good corporate governance* yaitu transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban secara tepat maka dapat dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya, mitra kerja tidak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas, para pemasok memiliki kepercayaan serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Banyak pedoman perusahaan menganjurkan untuk memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) guna meningkatkan transparansi pengungkapan informasi mengenai perusahaan. Selain itu dalam praktiknya, prinsip dan nilai *corporate governance* seharusnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu perusahaan dan sangat tergantung dengan bentuk perusahaan, jenis usaha, dan komposisi kepemilikan modal perusahaan. Pembahasan mengenai implementasi *corporate governance* tidak dapat dilepaskan dengan konsep dan sistem entitas itu

sendiri yang turut berkembang dengan sistem korporasi di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan pembuat keputusan atau yang dikenal dengan *agency problem* atau hubungan antara *principal* dan *agent* (Weston, 2001).

Sebagai tambahan mekanisme *corporate governance* yang terdapat di perusahaan perbankan terlihat lebih penting daripada sektor industri karena perbankan berperan penting sebagai pengatur utama dalam perekonomian. *Corporate governance* yang buruk pada bank akan membuat pasar kehilangan kepercayaan pada kemampuan bank untuk mengelola asset dan kewajiban termasuk deposit yang dapat memicu krisis likuiditas dan membawa krisis ekonomi pada suatu negara (Marco dan Fernandez, 2008). Bank juga berfungsi sebagai transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di mana Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional telah merumuskan cetak biru yang dikenal dengan Arsitek Perbankan Indonesia (API). API adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Salah satu perangkat penting yang berkorelasi dengan penerapan *corporate governance* adalah pengungkapan informasi yang efisien dan transparan guna melindungi kepentingan pemilik. Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi

tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) serta mengklarifikasi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen (Sheila *et.al.*, 2011). Dari berbagai macam pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (*social and environmental disclosure*) yang akan dipelajari lebih lanjut karena pedoman *corporate governance* menambahkan tanggung jawab manajer ke dalam aspek yang lebih luas. Lebih lanjut penanganan isu lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang serta pelaporan informasi lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting belakangan ini (Pramanik, 2008).

Gray (1993) dalam Lindrianasari (2004) menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari laporan keuangan. Penelitiannya menerangkan juga bahwa terdapat banyak studi yang akan menguji lebih lanjut mengenai informasi sosial yang dihasilkan oleh perusahaan dan menemukan bahwa informasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari informasi tersebut. Hal tersebut berkembang menjadi agenda rutin yang perlu dibahas dan dilaporkan kaitannya dengan citra perusahaan yang berkompeten dan bertanggung jawab di luar kepentingan bisnisnya. Citra perusahaan yang dimaksud adalah sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Suatu pelaporan dapat dipandang sebagai respon atas pemberitaan media yang bersifat negatif, kejadian sosial, atau dampak lingkungan tertentu sebagai akibat dari rendahnya penilaian yang diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan (Deegan *et.al.*, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh

Uwalomwa dan Uadiale (2011) juga menambahkan bahwa pelaporan lingkungan dan sosial telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun belakangan ini sebagai perkembangan proses berkelanjutan di seluruh dunia dan menjadi isu menarik di ruang lingkup akademis. Lebih jauh lagi konferensi *Global Reporting Initiative* pada tahun 2000 juga telah menawarkan pedoman laporan keuangan, lingkungan, dan sosial yang telah dijadikan pedoman oleh banyak perusahaan. Permasalahan yang sekarang muncul adalah pelaporan lingkungan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan di negara Indonesia bersifat sukarela (*voluntary*). Ionescu (2010) juga menyebutkan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan masih bersifat sukarela (*voluntary*) di banyak negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia.

Belum adanya tuntutan yang timbul dari pemilik perusahaan mengenai kepedulian terhadap isu lingkungan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelaporan informasi lingkungan dan sosial terhadap pemangku kepentingan dalam jangka panjang menjadikan pelaporan ini hanya akan menambah biaya dan tidak ada kaitannya dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut ditambah dengan tidak adanya pedoman atau standar yang baku mengenai pengungkapan lingkungan. Walaupun beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi pengungkapan lingkungan, antara lain Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC-PBB), *Institute of Chartered Accountant in England and Wales* (ICAEW), dan *Global Reporting Initiative* (GRI) (Utomo, 2001). Perusahaan yang melakukan pelaporan ini lazimnya perusahaan yang sudah memiliki jaringan yang luas dan memiliki beberapa alasan seperti menjaga reputasi perusahaan agar semakin banyak investor tertarik dan

perusahaan tetap bertahan di lingkungan masyarakat sehingga tidak mengalami penolakan.

Sudah banyak penelitian yang mengangkat tema *corporate governance*, tetapi sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan atau performa kinerja perusahaan non perbankan di ruang lingkup sektor industri manufaktur dan pertambangan misalnya adalah Erna Hidayah pada tahun 2007 yang lebih berfokus pada perusahaan publik di Indonesia, serta penelitian oleh Putri pada tahun 2006 yang lebih berfokus pada perusahaan manufaktur di Indonesia sedangkan di Amerika penelitian oleh Luce, Valenti, dan Mayfield pada tahun 2010 lebih membahas mengenai pengaruh performa perusahaan terhadap *corporate governance*.

Dalam satu tahun terakhir ini sudah terjadi kasus yang menyangkut *corporate governance* terhadap bank asal Amerika Serikat yaitu J.P.Morgan yang dituduh membiarkan lingkungan kerja yang sarat pelecehan seksual sehingga bank tersebut didenda sebesar US\$ 1,45 juta (Rp 14,5 miliar). Sebanyak 16 karyawan bank tersebut di Ohio diduga mengalami pelecehan saat bekerja. Mereka merasa dilecehkan karena tidak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dibandingkan broker pria (BBC Indonesia, 2013). Dari kasus yang terjadi pada tahun 2013 tersebut dapat dikembangkan penelitian mengenai hubungan *corporate governance* dengan pengungkapan perusahaan karena selama ini fokus penelitian lebih banyak meneliti pengungkapan sosial dan lingkungan yang terjadi di perusahaan-perusahaan non perbankan. Penelitian yang mempunyai fokus pada perbankan pernah dilakukan yaitu

mengenai pengaruh *corporate governance* pada pengungkapan informasi lingkungan dan sosial perusahaan perbankan di negara Malaysia oleh Sheila *et.al.* serta Aebi, Sabato, dan Schmid mengenai *corporate governance* di tengah krisis keuangan pada tahun 2011. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pengungkapan mengenai informasi sosial dan lingkungan dalam cakupan perusahaan perbankan masih bersifat sukarela dan seadanya saja terutama di negara-negara berkembang.

Dari beberapa contoh kasus dan hasil penelitian terdahulu yang disebutkan maka fokus riset penelitian kali ini mengkaji **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)”**. Penelitian yang dikaji kali ini menggunakan metode analisis data yang berbeda serta penambahan variabel struktur *Chief Risk Officer* (CRO) serta variabel komite nominasi dan remunerasi sebagai variabel independen untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Objek yang diteliti yaitu sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 dengan tujuan mendapatkan data terbaru laporan keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan bersandar pada Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang penerapan *corporate governance* bagi perusahaan perbankan secara umum.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka bisa dilihat bahwa pengungkapan laporan informasi lingkungan dan sosial merupakan salah satu bentuk *good corporate governance* dan berpotensi menjadi sumber informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan manajer selaku pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan. Walaupun pengungkapan laporan informasi lingkungan dan sosial masih belum dapat diukur secara pasti implementasinya pada setiap perusahaan dan pengaruhnya dalam jangka panjang, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial terutama dalam lingkup perusahaan di negara-negara berkembang.

Menurut Sharifah (2008) masih terdapat batasan penelitian hubungan antara variabel *corporate governance* dengan laporan pertanggungjawaban sosial (*corporate social responsibility report*) kecuali penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2002) serta Sharifah (2008). Penelitian terbaru yang dilakukan Sheila *et.al.* (2012) juga menemukan hasil yang signifikan antara variabel *corporate governance* dengan pengungkapan informasi sosial walaupun terdapat keterbatasan dengan ruang lingkup sampel yang diambil dan tidak dilakukannya pengukuran terhadap keaktifan dewan komisaris dan keefektifan independensi komite audit. Penelitian ini juga bermaksud mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisis dampak *corporate governance* terhadap laporan sosial dan lingkungan di sektor keuangan khususnya perbankan. Lebih jauh lagi *corporate governance* sebagai pedoman tata kelola dan etika

perusahaan terutama di sektor perbankan mempunyai kekuatan yang berpengaruh pada pengungkapan informasi dalam laporan tahunan (*annual report*). Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
2. Apakah struktur *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh pada pengungkapan sosial dan lingkungan?
5. Apakah independensi komite audit berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
6. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
7. Apakah komite nominasi dan remunerasi berpengaruh pada pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
2. Untuk menganalisis pengaruh struktur *Chief Risk Officer* (CRO) terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi saham terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
5. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
6. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.
7. Untuk menganalisis pengaruh komite nominasi dan remunerasi terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya
Data dan Informasi dalam penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi pihak pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dalam mengembangkan ilmu lebih lanjut dan bermanfaat bagi kepentingan praktik.
2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menambah ketrampilan, wawasan, dan pengetahuan sebagai bekal untuk diterapkan dalam dunia kerja sehingga menjadi suatu pedoman.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengenai manfaat suatu tata kelola perusahaan yang baik sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan pada perusahaan sesuai sudut pandang manajer perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan dan kepentingan *stakeholder*.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menelaah berbagai konsep dan teori dari variabel penelitian, selain itu juga menggambarkan model dari penelitian, serta perumusan hipotesis sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji secara empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variable penelitian dan operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang uraian objek penelitian, hasil pengolahan data, analisis data, serta interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan, penjabaran mengenai keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu prinsip model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* (manajer) dan pihak yang lain disebut *principal* (pemilik perusahaan). *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agent* yang dapat diartikan pula bahwa *principal* memberikan suatu amanah, tugas, tanggung jawab kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Pemegang saham sebagai pihak *principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat dan manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. *Principal* menilai prestasi *agent* berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi laba, harga saham, dan

deviden, maka semakin baik kinerja *agent* sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Manajer merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajer juga diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham serta wajib mempertanggungjawabkan semua usaha dan kinerjanya kepada pemegang saham. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam yang akurat, dipercaya, transparan, dan relevan adalah dengan menyusun laporan tahunan (*annual report*) tiap akhir periodenya. Laporan tahun ini digunakan oleh berbagai pihak terkait (*stakeholders*), termasuk manajemen perusahaan sendiri. Informasi akuntansi ini penting bagi pengguna eksternal karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Para manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kontak langsung dengan perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar pengguna eksternal yang kemudian menimbulkan suatu potensi masalah dalam perspektif teori keagenan yaitu adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Akibat adanya informasi yang tidak seimbang atau asimetris ini mengakibatkan masalah yang muncul karena pemilik kesulitan untuk memonitor dan mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

- a) *Moral Hazard*, yaitu para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- b) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana pemilik tidak dapat mengetahui keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan tugas.

Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut merupakan pihak yang berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Watts (1992) menyebutkan bahwa hubungan agensi kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan politik. Sehingga untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah terjadinya konflik keagenan, sudah menjadi kewajiban bagi pihak manajemen untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu, relevan, dan transparan. Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi dasar yang melandasi teori agensi, yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia

Sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), lalu manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

2. Asumsi tentang keorganisasian

Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta asimetri informasi antara pihak manajer dengan pemilik.

3. Asumsi tentang informasi

Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai komoditas yang diperjualbelikan sehingga dapat memengaruhi kualitas pengungkapan informasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah *corporate governance*. Prinsip utama *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keawajaran (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). *Corporate governance* merupakan konsep berlandaskan teori keagenan (*agency theory*) yang diharapkan dapat bertindak sebagai alat untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan menerima timbal balik berupa *return* atas dana yang telah mereka investasikan.

Bukti empiris yang diperoleh dari hasil riset Zhuang pada tahun 2000 menunjukkan masih lemahnya tata kelola perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dilakukan pelaku bisnis di Indonesia dengan menyepakati penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia (Pranata, 2007).

Oleh sebab itu sangat relevan bila penerapan *corporate governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas yang meliputi serangkaian aktivitas yang melibatkan hubungan antar manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar (Doddy, 2007). Selain itu *corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan juga untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui suatu

mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut.

2.1.2. Teori *Stakeholder*

Salah satu teori yang membahas pemangku kepentingan (*stakeholder*) dikemukakan oleh Madura (2009) dengan sebutan teori *stakeholder* yang berkaitan dengan suatu perspektif tanggung jawab sosial dari suatu entitas/organisasi dalam memandang lingkungan internal dan eksternal sebagai suatu keragaman dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak yang menanggung akibat karena bisnis dan mereka yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) ini berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan dan efek timbal balik yang diberikan perusahaan terhadap pihak-pihak terkait. Freeman (1984) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berkorelasi dengan lingkungan perusahaan ke dalam dua kategori, yakni internal dan eksternal. Bagian dari lingkungan internal adalah pemilik perusahaan (*shareholders*), konsumen, karyawan, dan pemasok. Sedangkan yang termasuk bagian dari lingkungan eksternal terdiri atas pemerintah, kompetitor, advokasi konsumen, pemerhati lingkungan, *Special Interest Group* (SIG), dan media. Warsono (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori stakeholder, yaitu:

1. Argumen Deskriptif

Argumen ini menyatakan mengenai persepi pemangku kepentingan secara sederhana tentang cara perusahaan beroperasi atau bekerja sebenarnya. Secara praktis, manajer mengarahkan fokus kinerjanya tidak hanya terhadap pemilik perusahaan saja tetapi juga terhadap seluruh pemangku kepentingan.

2. Argumen Instrumental

Argumen ini mendasari bahwa manajemen merupakan strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak dan memberi perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepentingannya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

3. Argumen Normatif

Argumen ini menjelaskan bahwa manajemen sudah seharusnya memperhatikan pemangku kepentingan. Perusahaan mempunyai penguasaan dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumber daya dan hak istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang mendapatkan timbal balik dari tindakan yang dilakukan perusahaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan, maka manajer harus dapat memberikan suatu bentuk pelaporan yang transparan, akuntabilitas, dan bersifat informatif terhadap pemangku kepentingan sehingga pemangku kepentingan dapat menilai keberlangsungan perusahaan. Di samping itu perusahaan juga harus dapat melakukan analisis *stakeholder* sehingga mampu mengetahui kebijakan dan

tindakan yang akan ditempuh oleh perusahaan. Menurut Warsono (2009) analisis pemangku kepentingan mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, kepentingan pemangku kepentingan, kekuatan pemangku kepentingan, dan koalisi pemangku kepentingan.

2.1.3. Corporate Governance

2.1.3.1. Definisi Corporate Governance

Syakhroza (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi yang baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil. Sejumlah perusahaan di berbagai belahan dunia juga mempunyai definisi tersendiri tentang yang mempunyai makna sama walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Negara-negara maju mendefinisikan *corporate governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab kepada *shareholder* dengan pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder* lainnya. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diluncurkan pada tahun 1999 dan kemudian berkembang menjadi acuan utama dalam penyusunan kode tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) bagi negara-negara di seluruh dunia. Tidak hanya perusahaan bisnis saja tetapi sudah banyak institusi internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) dan

Organization for Securities Commission (OSCO) menjadikan prinsip *corporate governance* yang disusun OECD sebagai pedoman dan penilaian kondisi *corporate governance* di suatu negara.

Sementara itu *Asian Development Bank* (ADB) menjelaskan bahwa *corporate governance* dinilai baik apabila mengandung empat nilai utama yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Di Indonesia sendiri secara harfiah *corporate governance* sering juga disebut tata kelola perusahaan, meskipun masih bias dalam terminologi manajemen. Menurut *Forum Corporate Governance In Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dapat disimpulkan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Konsep *corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasasn dan pengendalian kinerja manajemen perusahaan berdasarkan suatu tata kelola atau kerangka peraturan yang telah berlaku umum. Menurut Arifin (2005) tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, karyawan, dan pihak eksternal (investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan). Namun dalam praktiknya, *corporate governance*

berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepemilikan antara *principal* (pemilik) dengan pengendalian perusahaan oleh *agent* (manajer) sehingga menimbulkan konflik atau permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer. Permasalahan keagenan ini timbul karena pemilik mengalami hambatan dan kesulitan dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan akibat terjadi perbedaan aliran informasi yang dikehendaki antara manajer dengan pemilik perusahaan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dan membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan bagi perusahaan.

2.1.3.2. Prinsip *Corporate Governance*

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut direvisi pada tahun 2004 lalu diambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan serta memerhatikan perkembangan yang terjadi dijadikan acuan oleh banyak negara di dunia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman bagi semua entitas di seluruh dunia dan dapat diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Bagi para pelaku bisnis dan pasar modal, prinsip-prinsip

tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman yang berguna bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan. Prinsip - prinsip *corporate governance* menurut OECD pada tahun 2004 mencakup enam bidang yaitu:

- a) Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan *corporate governance* secara efektif
- b) Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan
- c) Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham
- d) Peranan pemangku kepentingan dalam *corporate governance*
- e) Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
- f) Tanggung jawab dewan pengurus

Sedangkan di Indonesia Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) mengemukakan konsep berbeda mengenai prinsip terjadinya *good corporate governance*, yaitu terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance* yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman secara universal dan dapat digunakan sebagai referensi di berbagai negara dengan menambahkan peraturan-peraturan menyesuaikan dengan sistem, nilai, dan kebijakan negara tersebut. Kelima prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Tranparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang mengatur perusahaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengatur supaya perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengatur perusahaan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kemudian melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terjaga dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d) Independensi (*Independency*)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen

atau mandiri sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.3. Peraturan *Corporate Governance*

Menurut riset yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* di tahun 2002, perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan alasan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku saja. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran perusahaan untuk mengaplikasikan *corporate governance* masih rendah walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang praktik *corporate governance*. Peraturan tersebut di antaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai praktik *good corporate governance* sebagai nilai dan konsep yang terkandung dalam perusahaan. Kemudian ada Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahunan yang berkaitan dengan prinsip transparansi dari *good corporate governance* yaitu mewajibkan penyampaian laporan yang penting secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Skema pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berdasar pada aturan BAPEPAM/LK dan BEI.

Kemudian untuk peraturan yang membahas praktik *corporate governance* terhadap korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditinjau pada peraturan BUMN KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Di sektor perbankan, *corporate governance* diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006.

2.1.4. Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Perusahaan yang melakukan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan ditunjukkan minimal dengan melakukan pengungkapan salah satu tema *voluntary disclosure* yang berisikan lingkungan, masyarakat, tenaga kerja, produk, konsumen atau energi (Hackston dan Milne, 1996). Walaupun pada kenyataannya pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak diungkap sebenarnya atau apa adanya karena perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas perusahaan. Hal itu mengakibatkan manajer hanya akan mengungkapkan informasi yang sifatnya baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pasar modal. Pernyataan tersebut didukung dengan anggapan

jika suatu informasi tidak diungkapkan maka penyebabnya adalah informasi tersebut tidak lagi relevan bagi investor atau informasi tersebut telah tersedia di tempat lain. Walaupun begitu terdapat sebagian perusahaan yang telah menggunakan informasi lingkungan dan sosial dalam menentukan kebijakan dalam melakukan tindakan dan memonitor hasilnya. Namun seberapa jauh hal tersebut dilakukan ditentukan oleh kebijakan, karakter, dan tujuan manajemen.

Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyajikan laporan berkaitan dengan aspek sosial cenderung untuk menarik perhatian publik dengan menekankan pada fakta yang menguntungkan dan bersifat kesinambungan. Kenyataan yang terjadi adalah beberapa perusahaan telah bersungguh-sungguh dalam mengungkapkan pelaporan sosial dan lingkungan dengan metode pengungkapan yang logis walaupun memperhatikan suatu pedoman umum. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan secara *voluntary* (Deegan, 2002):

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
- b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*).
- c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
- d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman.
- e. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
- f. Untuk mengendalikan kelompok *stakeholder* tertentu yang berpengaruh kuat (Ullman 1985; Roberts 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu *et.al.*, 1998)

- g. Untuk mematuhi persyaratan industri. Misalnya, di Australia, Industri pertambangan memiliki *Code for Environmental Management* sehingga ada tekanan tertentu untuk memenuhi aturan tersebut.
- h. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Di samping itu laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk mewajibkan perseroan yang usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan yang tidak bersinggungan secara langsung dengan sumber daya alam untuk mengungkapkan laporannya juga. Hal lain yang dibahas adalah mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di laporan tahunan. Namun banyak perusahaan yang masih meyakini bahwa pelaksanaan CSR seharusnya bersifat suka rela (*voluntary*) dan bukan kewajiban. Pada akhirnya, undang-undang tersebut hanya mewajibkan pelaksanaan CSR pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam dan mengharuskan bagi semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan CSR di laporan tahunan. Adanya pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan kegiatan CSR sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, tujuan akhir yang

diharapkan adalah perseroan memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan kegiatan CSR.

Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban sosial saat ini sebagian besar perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar telah melaporkan kegiatan CSR di *annual report*. Namun perihal yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Lebih lanjut, Cooper dan Owen (2007) menyatakan bahwa pelaporan saja tidaklah cukup untuk mencapai akuntabilitas, pelaporan tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan informasi mengenai lingkungan dan sosial secara obyektif. Pada awalnya Wiseman (1982) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya berisi informasi tentang dampak dan regulasi yang mengatur tentang lingkungan. Kemudian Ullmann (1985) menambahkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan terdiri dari gabungan laporan yang mengkaji tentang efek polusi lingkungan dengan perspektif pekerja.

Di masa sekarang ini salah satu mekanisme yang dapat dijalankan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan CSR menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan adalah mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Pelaksanaan CSR terkait dengan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), seperti yang dinyatakan pada prinsip GCG ketiga dari OECD (2004) menyebutkan bahwa perusahaan membutuhkan pengungkapan lingkungan dan sosial

yang merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) walaupun pada umumnya terdapat pada bagian terpisah dengan *Sustainability Report* atau tercantum dalam *Annual Report*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan perlu melaksanakan transparansi dan pengungkapan yang memadai yang berimplikasi pada pelaporan CSR kepada pihak yang membutuhkan. Sejak dirumuskannya peraturan internasional mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan, salah satu alat yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas pengungkapan laporan sosial dan lingkungan adalah menggunakan pedoman pengungkapan *Global Reporting Initiatives* (GRI). Di dalam pedoman GRI terdapat item-item pengungkapan yang harus dilaporkan secara jelas dan transparan sesuai dengan masing-masing indikator. Indikator-indikator tersebut dibagi menjadi 6 kategori yaitu ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk dengan total keseluruhan pengungkapan mencapai 81 item pengungkapan sesuai dengan GRI G3.1. Meskipun pada tahun 2013 GRI sudah mengeluarkan standar pengungkapan terbaru yaitu G4 tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang mengacu G3. 1 sebagai standar pengungkapannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Patten (1991) berusaha menguji pengaruh tekanan publik dan profitabilitas terhadap pengungkapan sosial 156 perusahaan yang terdapat pada *Fortune 500* tahun 1985. Dengan menggunakan teori *stakeholder*

penelitian Patten menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri berhubungan dengan luas pengungkapan sosial, tetapi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tersebut. Hackston dan Milne (1996) meneliti pengungkapan sosial dalam *annual report* 50 perusahaan terbesar di New Zealand dengan menggunakan teori agensi sebagai basis dalam merumuskan hubungan antar variabel ditemukan hasil yaitu ukuran perusahaan, industri, dan saham yang terdaftar di pasar modal lokal dan internasional (*multiple stock exchange listing*) berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Deegan dan Gordon (1996) melakukan eksplorasi penelitian menyangkut pengungkapan lingkungan perusahaan di Australia dengan menggunakan teori legitimasi untuk membandingkan jumlah pengungkapan lingkungan yang bersifat positif dan negatif. Hasil penelitian yang diukur dengan menggunakan *Average Industry Environmental Sensitivity Index* dan *Membership Weighted Industry Environmental Sensitivity Index* menyimpulkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan berita positif dan mengurangi berita negatif.

Pada penelitian selanjutnya, Cormier dan Gordon (2001) menguji strategi pelaporan isu sosial dan lingkungan pada tiga perusahaan listrik, dua perusahaan publik dan satu perusahaan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan publik cenderung mengungkap lebih banyak isu sosial dan lingkungan dibanding perusahaan swasta. Selanjutnya Cormier dan Gordon (2003) melakukan penelitian mengenai praktik pengungkapan lingkungan di Perancis dan menemukan bahwa biaya informasi yang diukur dengan kepemilikan saham, volume perdagangan, dan

pemberitaan media memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Di wilayah Asia penelitian dilakukan oleh Amad, Hassan dan Mohammad (2003) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan dalam *annual report* perusahaan di Malaysia. Dengan menggunakan *efficient contracting theory*, mereka menemukan bahwa hanya variabel leverage dan status auditor (*Big Five*) yang mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan.

Lalu penelitian Sharifah (2008) masih terdapat batasan penelitian hubungan antara variabel corporate governance dengan laporan pertanggungjawaban sosial (*corporate social responsibility report*). Penelitian terbaru yang Sheila *et.al.* (2012) juga menemukan hasil yang signifikan antara variabel *corporate governance* dengan pengungkapan informasi sosial walaupun terdapat keterbatasan dengan ruang lingkup sampel yang diambil dan tidak dilakukannya pengukuran terhadap keaktifan dewan dan keefektifan independensi komite audit

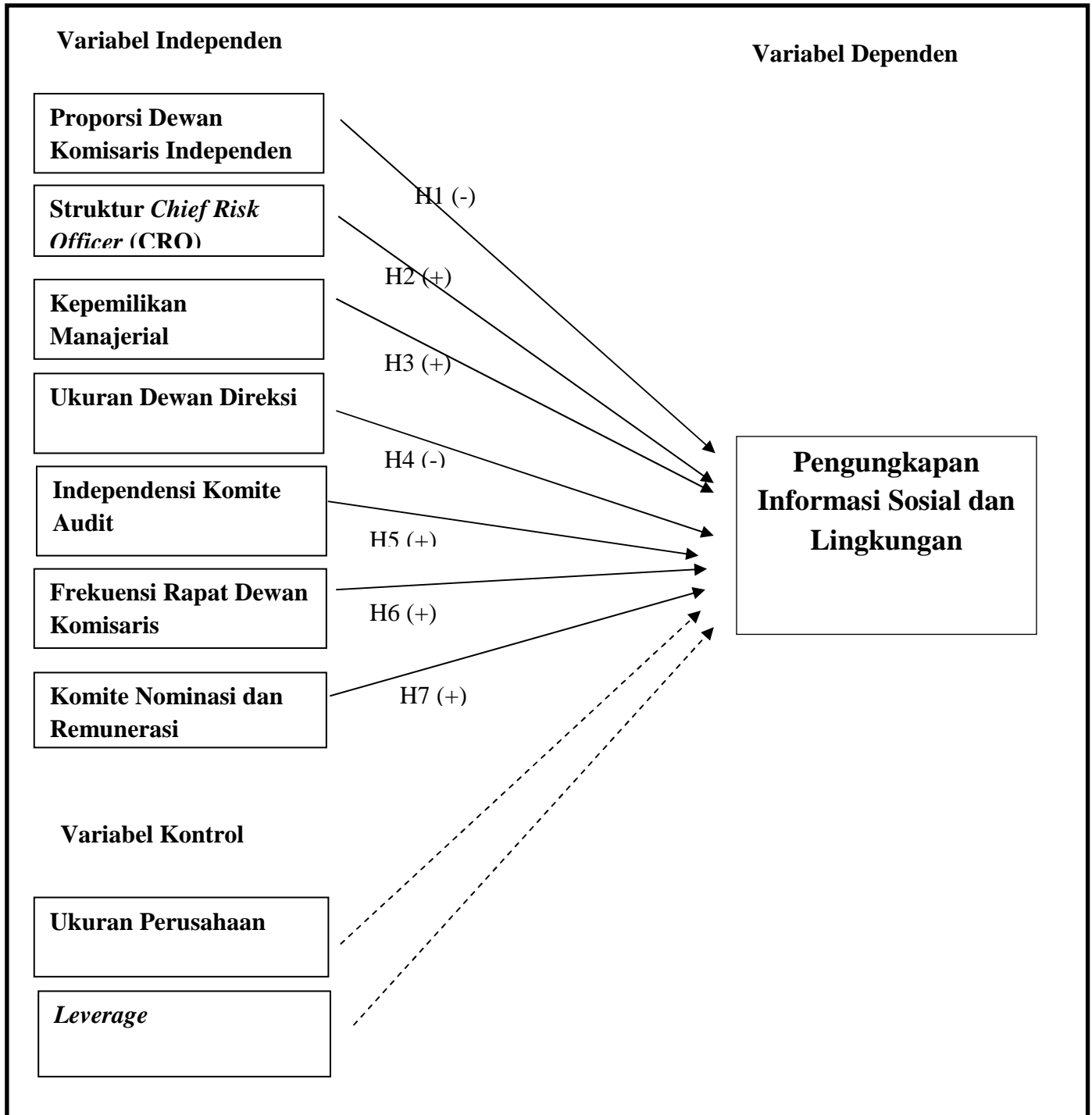
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan *review* penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk menguji mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam lingkup perusahaan perbankan. Mekanisme *governance* dapat diartikan sebagai suatu kerangka atau struktur dalam organisasi yang menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Struktur tersebut harus mampu mendukung *corporate governance* berdasarkan

prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Variabel mekanisme *corporate governance* yang terdapat pada penelitian kali ini yaitu proporsi dewan komisaris independen, struktur *Chief Risk Officer (CRO)*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta komite nominasi dan remunerasi sebagai variabel independen yang berpengaruh positif atau negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, lalu ditambahkan juga ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol dengan alasan semakin besar dan perusahaan lebih banyak menghasilkan laba berkecenderungan memiliki pengungkapan yang lebih tinggi karena mereka bertindak sebagai perantara keuangan dan memerlukan pengungkapan yang lebih komprehensif untuk meminimalkan biaya ketidakpatuhan. Sementara *leverage* pada pengungkapan perusahaan berkaitan dengan total hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity*) yang berarti tingginya *leverage* perusahaan akan mempengaruhi ketersediaan permintaan dan penyediaan informasi yang diperlukan oleh pemberi pinjaman (Aksu dan Kosedag, 2006).

Gambar 2.1
Model Kerangka Penelitian



2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap

Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Komposisi dewan merupakan hal yang paling penting dalam keefektifan memonitor pengendalian manajemen dan mengurangi biaya agensi (Choe dan Lee, 2003). Berdasarkan teori agensi, komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Lain halnya dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni (2009), Yusnita (2010) dan Fatayaningrum (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan memiliki kemungkinan bersifat formalitas hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen dalam menjalankan fungsi monitoring tidak menggunakan independensinya dengan baik untuk mengawasi kebijakan direksi (Darwis, 2009). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.2. Pengaruh Struktur *Chief Risk Officer* (CRO) terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vincent, Gabriel, dan Schmid (2011) menyediakan bukti kuat bahwa perusahaan perbankan di mana *Chief Risk Officer* (CRO) melapor langsung kepada dewan komisaris mendapatkan hasil yang signifikan pada masa krisis kredit, sementara bank-bank di mana CRO melapor kepada *Chief Executive Officer* (CEO) terlebih dahulu mendapatkan hasil signifikan lebih buruk daripada bank yang memiliki CRO melapor langsung kepada dewan komisaris. Sebuah survei terbaru dari *Deloitte* melaporkan bahwa 86% kliennya yang memiliki CRO atau setara dan kebanyakan dari mereka melapor langsung kepada dewan komisaris, CEO, atau keduanya. Dengan keberadaan komite manajemen resiko yang independen dan transparan juga lebih memungkinkan dewan komisaris untuk memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009).

Hasil ini menegaskan hipotesis bahwa struktur *corporate governance* dengan semua anggota dewan eksekutif melaporkan ke CEO bukanlah yang paling tepat untuk organisasi perbankan. Tugas CRO di antaranya untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai regulasi yang berlaku seperti *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), menjamin keamanan sumber informasi, dan melakukan *review* terhadap faktor yang

mempengaruhi investasi secara negatif. Oleh karena itu bisa saja terjadi CEO dan CRO memiliki konflik kepentingan. Sesuai dengan teori keagenan, konflik kepentingan yang dimaksud adalah pengungkapan informasi yang material mengenai resiko yang pernah dihadapi, sedang dihadapi, dan mungkin akan dihadapi di mana CEO dan CRO mempunyai pandangan berbeda mengenai pengambilan keputusan mengenai pengungkapan informasi tersebut kepada pemilik perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa struktur CRO berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi.

H2: Struktur *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Literatur *corporate governance* juga menyoroti pentingnya peran kepemilikan dalam pengungkapan. Dalam beberapa penelitian kepemilikan dibagi berdasarkan tiga perspektif kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan blok, dan kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan kali ini hanya mengambil dari perspektif kepemilikan manajerial saja dengan pertimbangan dari beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang relatif berbeda-beda mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan informasi seperti. penelitian yang dilakukan Chau dan Gray (2002), Eng dan Mak (2003), serta Leung dan Horwitz (2004) yang menghasilkan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan

pengungkapan informasi. Manajer mungkin tidak akan mengungkapkan semua informasi material kepada pihak luar karena mereka dapat menggunakan pengetahuannya tersebut untuk tidak memaparkan keuntungan perusahaan kepada *shareholders* luar dan juga menyembunyikan kejanggalan (*fraud*) dan ketidakkompetenan (*incompetence*). Sehingga dapat diperkirakan semakin tinggi proporsi kepemilikan direktur akan menghasilkan tingkat pengungkapan yang rendah.

Bagaimanapun juga sesuai dengan teori *stakeholder* yang mendasari bahwa manajer yang memiliki kepemilikan saham yang substansial akan membuat manajer berusaha untuk melaksanakan tugas manajerialnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan demi kepentingannya pribadi. Kepemilikan manajerial dianggap dapat meminimalisasi konflik keagenan antara manajemen dengan pemegang saham karena besar kecilnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen menggambarkan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Herawaty (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance*. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ballesta dan Garcia (2005) menghasilkan kesimpulan semakin tinggi kepemilikan manajerial akan menyebabkan semakin tinggi kualitas laporan keuangan, juga Norita dan Nahar (2004) menemukan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi yang dihasilkan.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.4. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Informasi

Sosial dan Lingkungan

Dewan direksi dengan lebih dari 7 atau 8 anggota akan berjalan tidak efektif (Jensen dan Ruback, 1993; Florackis dan Ozkan, 2004). Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Bodroastuti (2009) mencatat bahwa ukuran dewan direksi yang banyak dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang sedikit. Kontras dengan hal tersebut, Yoshikawa dan Phan (2003) mengemukakan pendapat bahwa semakin besar dewan maka semakin susah pengkoordinasiannya karena dengan jumlah besar akan berpotensi menimbulkan friksi dan konflik dalam pengambilan keputusan bersama. Lebih jauh lagi semakin besar ukuran dewan akan menghasilkan ketidak efektifan koordinasi, komunikasi, pembuatan keputusan, dan pengendalian dari CEO. Sebaliknya jika semakin kecil ukuran dewan maka akan menghasilkan partisipasi yang kondusif yang berdampak positif dalam melakukan fungsi monitoring dan kemampuan dewan membuat keputusan serta terjadi independensi dalam mengelola perusahaan (Huther, 1997)

Beberapa peneliti seperti Mak dan Li (2001), Yoshikawa dan Phan (2003), Yatim *et.al.* (2006), dan Khanchel (2007) memiliki pandangan serupa bahwa dalam rangka membuat dewan yang independen bebas dari pengaruh manajemen, terutama CEO maka ukuran dewan haruslah kecil sehingga kesulitan dalam mengorganisasikan dan mengkoordinasikan direktur dapat diminimalisir. Penemuan dari Byard *et.al.*

(2006) dari penelitian terhadap 1279 perusahaan selama tahun 2000 hingga tahun 2002 menunjukkan hasil analisa yang akurat pada pengungkapan informasi keuangan dengan ukuran dewan yang kecil. Jadi dapat dirumuskan bahwa semakin kecil ukuran dewan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

H4: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.5. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Menurut Hiro (1995), pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Anggota komite audit harus diangkat dari dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif, minimal terdapat tiga orang anggota dan mayoritas harus independen, seperti komisaris independen yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terafiliasi. Menurut Sam'ani (2008) komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan mengawasi proses audit secara keseluruhan.

McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) juga menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan juga keberadaan komite audit dianggap memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam kinerja perusahaan. Sesuai dengan teori *stakeholder* mengenai pemilik kepentingan untuk menjamin pengungkapan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka komite audit yang independen diperlukan untuk melaksanakan fungsi audit terhadap pelaporan yang kemudian akan diberikan kepada pemilik perusahaan. Jadi dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa dengan semakin tinggi tingkat independensi audit maka akan menghasilkan pengungkapan informasi yang baik pula

H5: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.6. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Frekuensi rapat dewan komisaris berarti intensitas dewan komisaris dalam melakukan rapat untuk mengevaluasi dan membahas perencanaan perusahaan ke depan berdasarkan informasi laporan perusahaan. Menurut Juwitasari (2008) semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akses informasi juga akan semakin merata di antara sesama direksi, sehingga keputusannya semakin baik yang berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya digunakan untuk

meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Vafea (1999) ditemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dengan kinerja perusahaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Perry (1996), aktivitas dewan komisaris mengukur kualitas dari peran pengawasan dan pengawasan manajer. Hipotesis yang disusun berdasarkan keterangan di atas adalah semakin sering dewan komisaris melakukan rapat yang ditandai keaktifan saat rapat maka meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

**H6: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap
Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan**

**2.4.7. Pengaruh Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Pengungkapan
Informasi Sosial dan Lingkungan**

Menurut Pedoman Umum GCG (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya. Adithipyankul *et.al.* (2009) menyatakan bahwa remunerasi yang diberikan perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja dewan komisaris yang kemudian juga berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Kinerja dewan komisaris tersebut diukur dengan besaran kompensasi yang harus diungkap setelah melaksanakan kewajibannya. Keberadaan komite nominasi di antara pemegang saham dapat berpengaruh penting karena komite ini juga berfungsi sebagai alat monitoring terhadap keefektivan kinerja dewan komisaris (Vafea, 1999). Sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan alat untuk memonitoring dewan komisaris, maka kelengkapan pelaporan yang mencakup semua aspek pengungkapan termasuk kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan hal yang esensial dan penting. Dengan demikian keberadaan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan

H7: Proporsi Komite Nominasi dan Remunerasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan pada penelitian mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan membagi jumlah item pengungkapan perusahaan dengan total keseluruhan item pengungkapan sesuai dengan GRI (G3.1) sebanyak 81 item.

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{81}$$

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori pengungkapan informasi yang disusun oleh GRI (*G3.1 Sustainability Reporting Guidelines*) yaitu meliputi kategori *economic*, *environmental*, dan *social* (*labour practices*, *human rights*, *society*, dan *product responsibility*) yang telah disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan CSR perusahaan di Indonesia. Pada setiap kategori tersebut terdiri dari beberapa item yang mencapai total 81 item pengungkapan berdasarkan aspek-aspek yang sesuai dengan masing-masing kategori pengungkapan. Masing-masing item

pada tiap indikator pengungkapan diberi skor 1, sehingga bila perusahaan mengungkapkan semua item kategori maka skor maksimal yang diperoleh yaitu 81 dengan keterangan perolehan nilai maksimal untuk masing-masing indikator adalah ekonomi 9, lingkungan 30, tenaga kerja 14, hak asasi manusia 11, masyarakat 8, dan tanggung jawab produk 9.

3.1.2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

3.1.2.1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kep. Direksi BEJ No.3 15/BEJ/06/2000 mengatur perusahaan perseroan wajib memiliki komisaris independen di antara dewan komisaris perusahaan dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris. Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

3.1.2.2. Struktur *Chief Risk Officer* (CRO)

Chief Risk Officer diwajibkan secara teratur melakukan *review* atas laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem manajemen resiko dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan membuat keputusan terkait seluruh resiko yang dihadapi maupun potensi resiko di masa mendatang juga mampu memelihara standar

pengendalian intern bank dengan menurunkan tingkat terjadinya resiko operasional. Pengukuran struktur CRO pada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Vincent, Gabriel, dan Schmid (2011) dengan menggunakan CRO sebagai variabel *dummy* dengan ketentuan bila CRO melaporkan secara langsung kepada dewan komisaris dan CEO mendapat nilai 1 dan bila hanya bertanggung jawab secara langsung kepada CEO atau dalam level tingkat manajemen ketiga maka mendapat nilai 0.

3.1.2.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, direktur, dan komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007 dalam Sabrinna, 2010). Namun variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*, dengan nilai 1 jika perusahaan mempunyai kepemilikan manajerial dan 0 jika perusahaan tidak mempunyai kepemilikan manajerial (Herawaty, 2008).

3.1.2.4. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi adalah anggota dewan yang bertanggung jawab terhadap kinerja dan manajemen perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan paling sedikit 3 orang.

3.1.2.5. Independensi Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab melakukan pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota sesuai dengan peraturan Bapepam Ketentuan Peraturan Nomor IX.1.5 yang tertuang dalam salinan Keputusan Nomor IX.1.5 Kep.643/BL.2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan jumlah komite audit minimal 3 orang yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dan dua orang eksternal yang independen.

3.1.2.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2002) rapat dewan komisaris merupakan pertemuan antara anggota dewan yang membahas tentang rencana strategi perusahaan ke depan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh manajemen. Jumlah rapat dewan komisaris pada penelitian ini diukur berdasarkan persentase kehadiran seluruh dewan komisaris dibandingkan dengan total rapat dewan komisaris yang diselenggarakan tiap tahunnya.

3.1.2.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman Umum GCG (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem

remunerasinya yaitu menentukan besaran gaji atau kompensasi yang diterima direksi maupun komisaris. Pada penelitian ini proporsi komite nominasi dan remunerasi diukur dengan jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi yang terdapat dalam perusahaan dibandingkan dengan jumlah minimal komite yang ditentukan peraturan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007 jumlah anggota komite nominasi dan remunerasi dalam suatu perusahaan paling sedikit 3 orang.

3.1.3. Variabel Kontrol

3.1.3.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total asset perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinilai dengan *log of total assets*. *Log of total assets* ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil maka nilai total asset dikonversikan menjadi logaritma matematis, konversi logaritma ini bertujuan untuk membuat data total asset terdistribusi normal.

$$\mathbf{SIZE} = \mathbf{log\ of\ Total\ Assets}$$

3.1.3.2. Leverage

Leverage menunjukkan rasio dari kewajiban dengan total aset perusahaan dan merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut likuidasi pada suatu waktu. Weston dan Copeland (1992) memformulasikan rasio leverage sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan:

Total hutang = Hutang lancar + hutang tidak lancar

Total asset = Asset lancar + asset tetap

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Untuk mempermudah penelitian ini maka menggunakan teknik *sampling* untuk pengambilan sampelnya.

3.2.2. Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tanggal pencatatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
2. Perusahaan perbankan yang telah menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
3. Perusahaan perbankan terdaftar yang memiliki kelengkapan informasi di *annual report* dan *sustainability report* terkait dengan variabel penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. yaitu *annual report* dan *sustainability report* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 yang termuat dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), *IDX Statistic 2008-2012*, website www.idx.co.id, dan website masing-masing perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dengan data sekunder sebagai jenis penelitian ini maka metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi penelitian. Metode studi pustaka adalah metode perolehan data dengan cara mempelajari pengetahuan dan teori dari buku, literatur, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap data yang dipublikasikan masing-masing perusahaan yang diterbitkan oleh BEI.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai (Ghozali, 2006): rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *Kurtosis* dan *Skewness*. Tujuan dilakukannya uji analisis statistik deskriptif adalah untuk mempermudah memahami variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini. Disamping itu berhubungan dengan penggunaan variabel dummy sebagai indikator variabel independen CRO dan kepemilikan manajerial maka akan digunakan juga analisis frekuensi untuk mengukur data tunggal yang ditampilkan dalam grafik batang.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini juga untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang diuji mempunyai data yang terdistribusikan secara normal dan bebas dari heterokedistisitas, multikolinieritas, serta autokorelasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi variabel terdistribusikan secara normal atau tidak. Menurut Ghozali (2006) untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji dengan *kolmogorof-Smirnov*, dengan pedoman pengambilan keputusan:

- a. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas $< 0,05$ secara statistik H_0 ditolak maka distribusi adalah tidak normal.
- b. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas $> 0,05$ secara statistik H_0 diterima maka distribusi adalah normal.

Selain itu ditampilkan juga grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual* untuk memperjelas hasil uji normalitas.

3.5.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Jika varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan apabila varians dari residual satu observasi ke observasi lain berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan nilai residual SRESID. Pendeteksian ada tidaknya dapat dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah distandarisasi (*standardized*). Dilakukan pula uji Glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian terakhir menggunakan uji korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (*two tailed*). Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Model regrasi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel independen sedangkan model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Multikolinieritas dianggap terjadi jika terdapat hubungan linear antara independen yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi maka standar *error* koefisien regresi akan semakin besar, akibatnya *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Batas (*cut off*) dari VIF > 0 dan nilai tolerance jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tingkat kolinieritas lebih dari 0,95 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan tujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t (saat ini) dengan residual periode t-1 (sebelumnya) dan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi terjadi apabila terdapat penyimpangan terhadap suatu observasi oleh penyimpangan yang lain atau terjadi korelasi diantara observasi berdasarkan waktu dan tempat. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi salah satunya dengan uji Durbin Watson (*DW-Test*). Uji Durbin Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta atau *intercept* dalam model regresi serta tidak ada

variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Dusbin waston adalah (Ghozali, 2006) yaitu:

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < dw < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak dapat disimpulkan	$dl \leq dw \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4 - dl < dw < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak dapat disimpulkan	$4 - du \leq dw \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi	Diterima	$du < dw < 4 - dl$

Keterangan:

du = Batas atas dw

dl = Batas bawah dw

3.5.3. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan pengujian data mengenai ketergantungan variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2006). Hasil dari

analisis regresi berganda berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ENVD} = \alpha + \beta \text{DKINDEP} + \beta \text{CRO} + \beta \text{KMAN} + \beta \text{UDDIR} + \beta \text{IKA} + \beta \text{FRD} + \beta \text{PNR} + \beta \text{LOG_ASSET} + \beta \text{LEV} + e$$

Keterangan:

ENVD : Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan

α : Konstanta

β : Koefisien regresi dari variabel independen

DKINDEP : Proporsi dewan komisaris independen

CRO : Struktur CRO

KMAN : Kepemilikan manajerial

UDDIR : Ukuran dewan direksi

IKA : Independensi komite audit

FRD : Frekuensi rapat dewan komisaris

PNR : Komite nominasi dan remunerasi

LOG_ASSET : Ukuran perusahaan

LEV : *Leverage*

e : *Error*

Selanjutnya adalah analisis korelasi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai semakin

mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Menurut Sugiyono (2007) ada beberapa kriteria untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi berganda yaitu :

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (*t-Test*) dan pengujian secara simultan (*F-test*)

3.5.4.1. Uji Parsial (*t-Test*)

Uji statistik parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan uji $t > 0,1$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan sedangkan jika nilai signifikan uji $t < 0,1$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.

3.5.4.2. Uji Simultan (*F-Test*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Jika probabilitas $> 0,1$ maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat jika probabilitas $< 0,1$ maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi dari sampel yang diteliti.

3.5.5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1) maka semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan bila nilainya semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2004). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Namun Ghozali (2006) juga menambahkan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik dengan alasan apabila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi tetapi tidak konsisten dengan teori yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos

dari uji asumsi klasik maka model tersebut seharusnya tidak dipilih menjadi model empiris dan menggantinya dengan model lain.

